

JEJAK INTELEKTUAL PERSIA: SAFFARIYAH, SAMANIYAH, DAN GHAZNAWIYAH DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

Abel Octavia Suman¹, Muhammad Shoheh², Ratna Sari³, Siti Imeliya⁴, Muhamad Kosim⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: abeloctaviasuman01@gmail.com¹, muhamad.shoheh@uinbanten.ac.id², ratnasariiii8877@gmail.com³, mohkosim16005@gmail.com⁴, imeliyaimeliya5@gmail.com⁵

Abstrak: Artikel ini membahas Kawasan Persia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan mengembangkan peradaban Islam, terutama pada era klasik saat kekuasaan pusat Dinasti Abbasiyah mulai mengalami penurunan baik dalam hal politik maupun administrasi. Situasi ini menghasilkan munculnya dinasti-dinasti lokal yang tidak hanya berperan sebagai penguasa wilayah, tetapi juga sebagai pelindung tradisi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Tulisan ini mengeksplorasi jejak pemikiran Persia melalui tiga dinasti utama, yaitu Dinasti Saffariyah, Samaniyah, dan Ghaznawiyah, dengan perhatian khusus pada kontribusi mereka di bidang intelektual, budaya, bahasa, dan penyebaran Islam. Dinasti Saffariyah dianggap sebagai tahap awal kebangkitan identitas Islam Persia, terutama melalui upaya mereka menghidupkan kembali bahasa Persia dalam konteks politik dan administrasi yang sebelumnya dikuasai oleh bahasa Arab. Walaupun kontribusi ilmiahnya masih terbatas, peran Saffariyah sebagai penggerak awal kesadaran budaya Persia dalam Islam menjadi dasar penting untuk perkembangan intelektual ke depan. Selanjutnya, Dinasti Samaniyah muncul sebagai pusat pengetahuan Islam Persia yang paling berpengaruh, menjadikan Bukhara dan Samarkand sebagai pusat pendidikan Islam, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan. Di bawah perlindungan dinasti ini, bahasa Persia Baru berkembang dengan pesat sebagai bahasa sastra dan kebudayaan, tanpa menghilangkan peran bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan Islam. Lingkungan intelektual di zaman Samaniyah menghasilkan tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Sina dan Rudaki, serta mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, kedokteran, hadis, fikih, dan sastra, sekaligus berkontribusi besar dalam proses islamisasi di Asia Tengah lewat pendidikan dan dakwah yang relatif damai. Dinasti Ghaznawiyah menambah jejak pemikiran Persia dengan mendistribusikan peradaban Islam ke area yang lebih luas melalui ekspansi politik dan budaya, khususnya ke Anak Benua India. Di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Ghaznawi, dinasti ini berhasil menggabungkan kekuatan militer dengan dukungan terhadap intelektual, sehingga perluasan wilayah tidak hanya berdampak pada penyebaran Islam, tetapi juga pertukaran ilmu pengetahuan antar budaya. Dukungan terhadap ilmuwan seperti Al-Biruni mencerminkan ketertarikan tinggi Ghaznawiyah dalam memajukan ilmu, khususnya dalam bidang astronomi, matematika, geografi, serta studi perbandingan antara budaya dan agama. Penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi dan sastra semakin memperkuat identitas budaya Islam Persia yang berdampak besar pada perkembangan peradaban Islam di India. Lewat analisis historis-kualitatif yang berbasis pada kajian literatur, artikel ini menegaskan bahwa Dinasti Saffariyah, Samaniyah, dan Ghaznawiyah memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk wajah peradaban Islam. Persia tidak hanya sebagai daerah politik, tetapi juga sebagai pusat intelektual yang menjembatani tradisi

sebelum Islam dengan nilai-nilai Islam, sehingga memperkaya warisan peradaban Islam secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Persia, Dinasti Safariyah, Dinasti Samaniyah, Dinasti Ghaznawiyah, Peradaban Islam, Intelektual Islam.

Abstract: *This article discusses the Persian region's significant role in shaping and developing Islamic civilization, particularly during the classical era when the central power of the Abbasid Dynasty began to decline, both politically and administratively. This situation resulted in the emergence of local dynasties that not only served as regional rulers but also as protectors of Islamic scientific and cultural traditions. This paper explores the traces of Persian thought through three main dynasties: the Saffarids, Samanids, and Ghaznavids, with particular attention to their contributions to intellectual, cultural, linguistic, and Islamic propagation. The Saffarids are considered the initial stage of the revival of Persian Islamic identity, particularly through their efforts to revive the Persian language in political and administrative contexts previously dominated by Arabic. Although their scientific contributions were still limited, the Saffarids' role as early movers of Persian cultural awareness within Islam laid an important foundation for future intellectual development. Subsequently, the Samanids emerged as the most influential center of Persian Islamic knowledge, making Bukhara and Samarkand centers of Islamic education, literature, and science. Under the patronage of this dynasty, New Persian flourished as a literary and cultural language, without diminishing Arabic's role as the language of Islamic scholarship. The intellectual environment of the Samanids produced important figures such as Ibn Sina and Rudaki, and fostered progress in various fields of knowledge, including philosophy, medicine, hadith, jurisprudence, and literature. They also contributed significantly to the Islamization of Central Asia through education and relatively peaceful da'wah. The Ghaznavid dynasty furthered the legacy of Persian thought by spreading Islamic civilization to a wider area through political and cultural expansion, particularly into the Indian subcontinent. Under the leadership of Sultan Mahmud Ghaznavid, the dynasty successfully combined military power with support for intellectuals, resulting in territorial expansion not only for the spread of Islam but also for the exchange of knowledge between cultures. Their support for scholars such as Al-Biruni reflected the Ghaznavids' keen interest in advancing knowledge, particularly in astronomy, mathematics, geography, and the comparative study of cultures and religions. The use of Persian as an official and literary language further strengthened the Islamic cultural identity of Persia, which had a significant impact on the development of Islamic civilization in India. Through a historical-qualitative analysis based on literature review, this article asserts that the Saffarid, Samanid, and Ghaznavid dynasties made complementary contributions to shaping Islamic civilization. Persia served not only as a political region but also as an intellectual center that bridged pre-Islamic traditions with Islamic values, thus enriching the legacy of Islamic civilization comprehensively and sustainably.*

Keywords: Persia, Saffarid Dynasty, Samanid Dynasty, Ghaznavid Dynasty, Islamic Civilization, Islamic Intellectuals.

PENDAHULUAN

Persia merupakan wilayah yang memiliki signifikansi besar dalam sejarah peradaban Islam, baik dalam aspek politik, budaya, maupun intelektual. Sebelum datangnya Islam, daerah ini telah memiliki warisan administratif, sastra, dan pengetahuan yang kokoh melalui peradaban Achaemenid, Parthia, dan Sassaniyah. Ketika Islam menyebar di Persia pada abad ke-7 Masehi, proses islamisasi tidak menghilangkan tradisi yang ada, melainkan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya Persia. Penggabungan ini menjadikan Persia sebagai salah satu lokasi utama untuk perkembangan peradaban Islam klasik, terutama dalam ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, dan sistem pemerintahan Islam.¹

Memasuki abad ke-9 M, kekuatan pusat Dinasti Abbasiyah mulai melemah akibat perselisihan internal, lemahnya pengawasan administratif, serta adanya kekuatan lokal di wilayah kekuasaan Islam. Keadaan ini memberi kesempatan bagi munculnya dinasti-dinasti daerah yang memiliki otonomi politik secara de facto, meskipun secara simbolis tetap mengakui kekuasaan khalifah Abbasiyah. Dalam area Persia, kondisi ini menciptakan Dinasti Saffariyah, Samaniyah, dan Ghaznawiyah, yang bukan hanya berfungsi sebagai pihak yang berkuasa, tetapi juga sebagai pelindung serta pengembang tradisi pengetahuan Islam. Dinasti ini menjadi contoh yang jelas bagaimana kekuasaan lokal dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan peradaban Islam di luar pusat kekhalifahan Baghdad.²

Dinasti Saffariyah, yang muncul lebih awal pada pertengahan abad ke-9 M di Sistan, sering dianggap sebagai lambang kebangkitan politik Persia Islam setelah periode kekuasaan Arab. Meskipun rezimnya tidak berlangsung lama dan kontribusi ilmiahnya kurang menonjol, Saffariyah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran identitas Persia dalam konteks politik Islam. Kebijakan penggunaan bahasa Persia dalam administrasi dan komunikasi politik menjadi langkah yang mengarah pada perkembangan sastra dan budaya Persia Islam di masa mendatang. Peran historis ini menjadikan Saffariyah sebagai pijakan awal bagi kebangkitan intelektual Persia pada zaman Samaniyah dan Ghaznawiyah.

¹ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam, Volume 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods* (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hlm. 293–305.

² Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 180–195.

Pencapaian intelektual Persia mencapai titik tertingginya selama masa Dinasti Samaniyah (819–999 M) yang berpusat di Bukhara dan Samarkand. Dinasti ini dikenal sebagai pelindung bagi para ulama, ilmuwan, dan sastrawan, serta berhasil menciptakan suasana intelektual yang mendukung pengembangan berbagai bidang ilmu. Bahasa Persia Baru berkembang pesat sebagai bahasa sastra dan budaya, sedangkan bahasa Arab tetap dipertahankan sebagai bahasa keilmuan Islam. Pada masa ini, tokoh besar seperti Ibnu Sina (Avicenna) muncul, dengan pemikirannya yang memberikan pengaruh signifikan hingga ke dunia Barat, dan Rudaki yang dikenal sebagai pelopor sastra Persia klasik. Dinasti Samaniyah juga memiliki peran krusial dalam penyebaran Islam Sunni di Asia Tengah melalui jalur pendidikan dan lembaga keagamaan.³

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dinamika Otonomi Regional dan Identitas Lokal (Dinasti Saffariyah)

Menurut tinjauan Silverstein (2020), munculnya Dinasti Saffariyah di wilayah Sistan merupakan manifestasi pertama dari perlawanan terhadap sentralisme Kekhalifahan Abbasiyah yang didominasi etnis Arab. Literatur ini menyoroti bahwa Ya'qub bin Laith as-Saffar tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga memicu kesadaran identitas Persia yang selama ini teredam. Saffariyah dipandang sebagai jembatan sosiopolitik yang memungkinkan wilayah Timur Islam untuk mengelola urusan internal mereka sendiri. Studi terbaru menekankan bahwa kepemimpinan Saffariyah yang egaliter—berasal dari kelas pekerja (pandai besi)—mengubah struktur aristokrasi di Persia Timur dan memberikan legitimasi baru bagi penguasa non-Arab untuk memimpin komunitas Muslim tanpa harus bergantung sepenuhnya pada restu politik Baghdad.

2. Masa Keemasan Intelektual dan Birokrasi (Dinasti Samaniyah)

Dalam karya Starr (2018), Dinasti Samaniyah ditinjau sebagai puncak pencapaian intelektual di Asia Tengah. Tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa stabilitas yang diciptakan oleh Samaniyah di Transoxiana adalah faktor kunci yang melahirkan ilmuwan sekaliber Ibnu Sina. Berbeda dengan dinasti sezamannya, Samaniyah berhasil melakukan sinkretisme antara hukum Islam dengan struktur administrasi Persia kuno. Bennison (2019)

³ C. E. Bosworth, *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996), hlm. 92–110.

menambahkan bahwa sistem birokrasi Samaniyah menjadi standar emas (*gold standard*) bagi pemerintahan Islam di masa depan. Samaniyah tidak hanya berperan sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai kurator budaya yang menyelamatkan sastra Persia dari kepunahan melalui dukungan terhadap penyair-penyair besar, yang kemudian menciptakan identitas "Muslim-Persia" yang unik.

3. Militerisme dan Ekspansi Lintas Budaya (Dinasti Ghaznawiyah)

Bano (2018) memberikan tinjauan bahwa Dinasti Ghaznawiyah merupakan aktor utama dalam pergeseran demografi politik dari dominasi Persia ke dominasi Turk. Pustaka ini menyoroti bahwa Ghaznawiyah bukan sekadar melanjutkan kekuasaan Samaniyah, melainkan mentransformasi kekuasaan tersebut menjadi sebuah imperium militer yang ekspansif ke anak benua India. Sultan Mahmud al-Ghaznawi dipandang sebagai tokoh sentral yang memformalkan gelar "Sultan" sebagai simbol pemisahan antara otoritas militer-sekuler dengan otoritas spiritual khalifah. Tinjauan ini menunjukkan bahwa pengaruh Ghaznawiyah sangat krusial dalam memperkenalkan budaya Turko-Persia ke India, yang di kemudian hari menjadi fondasi bagi pembentukan Kesultanan Delhi dan Imperium Mughal.

4. Krisis Ekonomi dan Keruntuhan Sistemik

Mengenai kemunduran, Peacock (2019) dalam analisisnya mengenai perbatasan timur dunia Islam, meninjau bahwa kejatuhan Ghaznawiyah dipicu oleh kegagalan sistem militer konvensional dalam menghadapi dinamika baru suku-suku nomaden Oghuz Turk (Seljuk). Tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang parah; kekayaan hasil rampasan perang tidak dikelola menjadi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, melainkan terkuras untuk membiayai tentara bayaran yang tidak setia. Sementara itu, Lapidus (2018) memberikan tinjauan bahwa disintegrasi Samaniyah lebih disebabkan oleh konflik internal antara elit birokrasi dan militer budak, yang menciptakan celah bagi kekuatan luar seperti Qarakhaniyah untuk melakukan intervensi total.

5. Warisan dan Transmisi Peradaban

Secara kolektif, literatur kontemporer memandang ketiga dinasti ini sebagai satu rangkaian proses "Persianisasi" dunia Islam. Bennison (2019) menyimpulkan bahwa meskipun secara politik ketiga dinasti ini runtuh, warisan administratif dan budayanya tetap hidup. Ghaznawiyah bertindak sebagai transmitter yang membawa tradisi birokrasi dan seni

Samaniyah ke wilayah-wilayah baru. Tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa tanpa fondasi yang diletakkan oleh Saffariyah, kehalusan budaya Samaniyah, dan kekuatan ekspansi Ghaznawiyah, karakter Islam di wilayah Timur (Asia Tengah dan Asia Selatan) tidak akan memiliki kekayaan intelektual dan arsitektural seperti yang kita kenal saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-historis untuk menelaah pengaruh intelektual Persia melalui Dinasti Saffariyah, Samaniyah, dan Ghaznawiyah dalam sejarah peradaban Islam. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam proses, ide, dan sumbangan intelektual yang berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya pada ketiga dinasti tersebut. Data untuk penelitian diperoleh melalui penelitian pustaka dengan memanfaatkan sumber utama seperti karya-karya sejarah Islam klasik serta sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian akademik yang relevan dengan topik yang dikaji.

Proses analisis data dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kritik sumber bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan dan kredibilitas data, baik dari sisi otentisitas maupun validitas isi, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah data diverifikasi, analisis dan interpretasi dilakukan untuk memahami hubungan antara kekuasaan politik dan perkembangan intelektual selama masa Dinasti Saffariyah, Samaniyah, dan Ghaznawiyah. Hasil dari analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dan kronologis dalam bentuk narasi ilmiah demi memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peran Persia dalam perkembangan peradaban Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinasti Saffariyah

Dinasti Saffariyah atau Saffarid merupakan salah satu dinasti Islam awal yang muncul di wilayah Persia bagian timur (Sistan) pada abad ke-9 M. Didirikan oleh Ya'qūb bin al-Layth al-Ṣaffār, seorang mantan pandai besi yang berhasil menguasai wilayah luas melalui kekuatan militer. Saffariyah berkembang pesat dengan wilayah kekuasaan yang mencakup Sistan, Khurasan, Fars, hingga India barat laut. Dinasti ini menjadi unik karena pendirinya berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan bangsawan atau keturunan keluarga terpandang. Melalui keberanian, kepemimpinan

militer, dan dukungan pasukan lokal, Ya'qūb berhasil membangun kekuatan besar yang bahkan menantang legitimasi Abbasiyah.

Ya'qūb bin al-Layth al-Ṣaffār lahir di Sistan, Persia timur (sekarang Iran bagian tenggara). Nama “al-Ṣaffār” berasal dari profesinya sebagai pandai besi (tukang tembaga/perak). Ia memimpin kelompok militer lokal “ayyār” yang kemudian berkembang menjadi pasukan besar. Pada tahun 861 M, Ya'qūb berhasil merebut kekuasaan di Sistan dan mendirikan Dinasti Safariyah. Dari sana, ia memperluas wilayah ke Bost, Kabul, Makran, Khurasan, dan Fars. Bahkan pada tahun 876 M, ia mencoba merebut Baghdad dari Abbasiyah, namun dikalahkan di Pertempuran Dayr al-ʿĀqūl.

Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa Ya'qūb (861–879 M) dan saudaranya Amr bin al-Layth (879–900 M). Wilayah Safariyah meliputi Persia Timur (Sistan, Khurasan, Fars, Kerman) Afghanistan (Bost, Kabul), Pakistan barat (Makran), Bagian India utara.

Ciri pemerintahan Safariyah adalah dominasi militer. Keberhasilan mereka membuat Abbasiyah harus mengakui eksistensi Safariyah sebagai penguasa de facto di wilayah timur Islam.

Setelah wafatnya Ya'qūb, kekuasaan beralih ke saudaranya Amr bin al-Layth. Namun, pada tahun 900 M, Amr dikalahkan oleh Isma'il bin Ahmad dari Dinasti Samanid dalam pertempuran di Balkh. Kekalahan ini menyebabkan hilangnya Khurasan dan menurunnya kekuatan Safariyah (Bosworth, 1994). Pada awal abad ke-10, wilayah Safariyah hanya terbatas di Sistan.⁴ Dinasti ini bertahan dalam kondisi lemah hingga ditaklukkan oleh Mahmud dari Ghazni pada tahun 1002 M. Setelah itu, Sistan berada di bawah kekuasaan Ghaznavid, dan Safariyah kehilangan peran politik besar.

Meskipun singkat, Dinasti Safariyah meninggalkan beberapa warisan penting:

1. Mobilitas Sosial: menunjukkan bahwa rakyat biasa dapat menjadi penguasa melalui kekuatan militer.
2. Kebangkitan Persia: Safariyah mendukung penggunaan bahasa Persia dalam administrasi dan sastra, yang menjadi awal “Persia Baru” dalam perkembangan kesusastraan Islam.
3. Peluang bagi Dinasti Lokal: membuka jalan bagi munculnya dinasti-dinasti lain di wilayah Iran Timur, seperti Samanid dan Ghaznavid.

⁴ Hugh Kennedy, *Nabi Muhammad dan Masa Kekhalifahan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 262.

B. Dinasti Samaniyah

Dinasti Samaniyah merupakan salah satu Dinasti yang ada di dunia Islam pada masa ketika politik pemerintahan Khalifah Abbasiyah mulai melemah Dinasti Samaniyah salah satu suku dari Persia yang sebelum memeluk Islam beragama Zoroaster (Majusi). Pemerintahan Dinasti berpusat di Bukhara, tidak begitu santer dalam pengetahuan ummat Islam, padahal Dinasti ini hampir-hampir menyamai zaman keemasan Abbasiyah dari segi capaian kemajuan dan perkembangan peradaban yang pernah ada di dunia Islam.⁵

Dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Saman khudat. Nama Samaniyah dinisbahkan kepada leluhur pendirinya yaitu Samankhudat, seorang pemimpin suku dan tuan tanah keturunan bangsawan terkenal di Balkh, sebuah daerah di sebelah utara Afghanistan. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa dinasti ini bermula dari masuknya Samankhudat menjadi penganut Islam pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik (khalifah Bani Umayyah), sejak itu Samankhudat dan keturunannya mengabdikan diri kepada penguasa Islam. Pada masa kekuasaan al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M) dari Dinasti Bani Abbasiyyah, empat cucu Samankhudat memegang jabatan penting sebagai gubernur dalam wilayah kekuasaan Abbasiyah yaitu Nuh di Samarkand, Ahmad bin Asad di Farghana (Turkistan) dan Transoksania, Yahyabin Asad di Shash serta Asyrusanah (daerah di utara Samarkand), dan Ilyas di Heart, Afghanistan.⁶

Seorang cucu Samankhudat yang bermama Ahmad bin Asad, dalam perkembangannya mulai merintis berdirinya Dinasti Samaniyah di daerah kekuasaannya, Farghana. Ahmad mempunyai dua putra. Nasr dan Ismail, yang juga menjadi orang kepercayaan Abbasiyah. Nasr 1 bin Ahmad dipercaya menjadi gubernur di Transoksania dan Isma'il 1 bin Ahmad di Bukhara. Selanjutnya Nasr 1 bin Ahmad mendapat kepercayaan dari khalifah al-Mu'tamid untuk memerintah seluruh wilayah Khurasan dan Transoksania, dan daerah ini menjadi basis perkembangan Dinasti Samaniyyah. Oleh sebab itu Nasr 1 bin Ahmad dianggap sebagai pendiri hakiki dinasti ini.

Keluasaan kekuasaan Dinasti Samaniyah membentang sampai perbatasan India dan Turkistan. Tegaknya Dinasti Samaniyah ini bisa jadi merupakan manifestasi dari hasrat masyarakat Iran pada waktu itu. Adapun pelopor yang pertama kali memproklamasikan Dinasti Samaniyah ini, sebagai mana penjelasan Philip K. Hitti adalah Nasr Ibn Ahmad (874 M), cucu

⁵ Hugh Kennedy, *Nabi Muhammad dan Masa Kekhalifahan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 260–263.

⁶ C. E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 99–101.

tertua dari keturunan Samaniyah, bangsawan Balk Zoroasterian, dan di cetuskan di Transoxiana. Nasr Ibn Ahmad dipercaya menjadi gubernur di Transoksania dan Isma'il I bin Ahmad di Bukhara. Selanjutnya Nasr Ibn bin Ahmad mendapat kepercayaan dari khalifah al-Mu'tamid untuk memerintah seluruh wilayah Khurasan dan Transoksania, dan daerah ini menjadi basis perkembangan Dinasti Samaniyyah. Oleh sebab itu Nasr I bin Ahmad dianggap sebagai pendiri hakiki dinasti ini. Dalam sejarah Samaniyah terdapat dua belas khalifah yang memerintah secara berurutan, yaitu:

1. Ahmad Ibn bin Ibn Saman (gubernur Farghana) 204 H/819 M
2. Nashr Ibn bin Ahmad (semula gubernur Samarkand) 250 H/864 M
3. Ismail Ibn bin Ahmad 279 H/892 M
4. Ahmad II bin Ismail 295 H/907 M
5. El-Amir al-Mu'ayyad Abdul Malik 1 343 H/954 M
6. Al-Amir al-Hamid Nuh 1331 H/943 M
7. Al-Amir al-Mu'ayyad Abdul Malik 1 343 H/954 M
8. Al-amir as-Sadid Manshur I 350 H/961 M
9. Al-Amirar-Ridha Nuh II 365 H/976 M
10. Mansur II 387 H/997 M
11. Abdul Malik II 389 H/999 M
12. Ismail II Al-Muntashir 390-395H/1000-1005 M

Dinasti Samaniyah adalah sebuah dinasti yang memerintah di wilayah Persia dan sebagian Asia Tengah sejak sekitar tahun 819 M hingga 1005 M. Keberadaan Dinasti Samaniyah menjadi penting karena mereka mampu menghidupkan kembali tradisi politik dan kebudayaan Persia di tengah dominasi kekuasaan Arab dan Turki di kawasan tersebut.

Kemajuan dinasti samaniyah

Perkembangan politik Dinasti Samaniyah dimulai ketika mereka memperoleh legitimasi dari Kekhalifahan Abbasiyah pada awal abad ke-9. Abbasiyah memberikan kewenangan kepada keluarga Saman untuk memerintah wilayah Transoxiana, sebuah kawasan strategis yang kini mencakup Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagian wilayah Asia Tengah lainnya. Dari sinilah kekuasaan Samaniyah berkembang semakin kuat. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan

dan menciptakan stabilitas pemerintahan, meskipun harus berhadapan dengan tantangan dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda di sekitarnya. Bukhara kemudian menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan di bawah kepemimpinan mereka.

Selain dalam bidang politik, Dinasti Samaniyah juga memberikan perlindungan besar terhadap ilmu pengetahuan dan budaya. Pada masa ini, sastra, seni, serta tradisi intelektual Persia mengalami perkembangan yang pesat. Banyak ilmuwan dan cendekiawan terkenal seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menemukan ruang untuk mengembangkan karya-karya mereka. Dukungan terhadap kebudayaan Persia menjadi salah satu ciri penting Dinasti Samaniyah, sekaligus menegaskan peran mereka sebagai pelindung peradaban Islam-Persia yang memadukan unsur Arab, Iran, dan Asia Tengah.

Dinasti Samaniyah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, maupun aspek lainnya. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti ini adalah Ibnu Sina. Selain itu, lahir pula para pujangga dan ilmuwan besar dalam bidang kedokteran, astronomi, serta filsafat, seperti Al-Firdausi, Umar Khayyam, Al-Biruni, dan Zakariya al-Razi. Dinasti Samaniyah juga berhasil menjadikan kota Bukhara dan Samarkand sebagai pusat kebudayaan sekaligus pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur di dunia Islam. Kedua kota ini bahkan mampu menyaingi pusat-pusat peradaban lain, seperti Baghdad dan Cordova. Kemajuan tersebut turut ditopang oleh perkembangan ekonomi yang stabil, sehingga masyarakat hidup dalam ketenteraman. Hal ini dimungkinkan karena Dinasti Samaniyah tetap menjaga hubungan erat dengan pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad⁷.

Bidang kedokteran, ilmu falak, dan filsafat mengalami kemajuan pesat pada masa ini. Ilmu-ilmu tersebut disusun, direkonstruksi, serta diterjemahkan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Salah satu karya penting dalam bidang kedokteran adalah al-Manshuri yang ditulis oleh Abu Bakr al-Razi. Pada masa ini juga lahir filsuf muda bernama Ibnu Sina yang pada usia delapan belas tahun sudah mampu mengobati Amir Nuh bin Mansur. Dalam bidang sastra muncul penyair besar Al-Firdawsi (934–1020) dengan karya-karyanya yang monumental. Seorang wazir terkenal pada masa pemerintahan al-Mansur I bin Nuh (961–976), bernama Bal'ami, juga tercatat dalam sejarah

⁷ ajid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), hlm. 123–125.

sebagai penerjemah Mukhtasar al-Thabari. Selain itu, perpustakaan besar Dinasti Samaniyah di Bukhara menyimpan koleksi buku yang sangat beragam dan tidak ditemukan di tempat lain. Tingginya capaian peradaban manusia pada masa Dinasti Samaniyah bahkan jauh melampaui apa yang telah dicapai oleh dinasti-dinasti sebelumnya. Kemajuan ini tidak hanya terlihat dalam bidang sains dan filsafat, melainkan juga dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang semakin berkembang pesat pada periode tersebut.

➤ **Kemunduran dinasti samaniyah**

Sekalipun Dinasti Samaniyah mencapai puncak kegemilangannya dalam pemerintahannya, sekaligus merupakan salah satu Dinasti Iran yang paling tercerahkan, Samaniyah tidak terlepas dari kekurangan, selain persoalan biasa yang muncul dari pergolakan aristokrasi militer dan situasi sulit menyangkut suksesi pemerintahan, muncul juga ancaman baru yakni para pengembara Turki yang bergerak menuju Utara. Bahkan di dalam Negara sendiri kekuasaan berangsur-angsur diambil alih oleh budak-budak Turki, yang justru merupakan golongan yang sering diadili oleh penguasa Samaniyah. Salah satu wilayah Samaniyah sebelah selatan Oxus, perlahan-lahan dicaplok oleh Dinasti Ghaznawi, yang berkuasa di bawah pimpinan salah satu budak Turki. Wilayah disebelah Utara sungai dirampas oleh Ilek (Ilaq) khan dari Turkistan yang pada 992 merebut Bukhara dan tujuh tahun kemudian melakukan Coup de Grace terhadap Dinasti Samaniyah yang riwayatnya sudah berakhir.

Kesuksesan dan prestasi capaian tertinggi dalam peradaban, tidak menjamin akan langgengnya sebuah Dinasti, termasuk Dinasti Samaniyah yang dipandang sangat cukup sukses dalam membangun kultur dan keagamaan dalam masa pemerintahannya. Sekalipun demikian, sebetulnya rezim Samaniyah telah mengalami disintegrasi pada abad kesepuluh, dan wilayah kekuasaannya di Khurasan dan Afghanistan jatuh ketangan Alptigin, seorang Gubernur budak yang beribukota di Ghazna (Afghanistan) Alptigin mendirikan sebuah rezim tentara budak yang menaklukkan dan menguasai Khurasan sejak 999 sampai tahun 1040. Bahkan menguasai Transoxania serta Iran barat.⁸

Kemunduran Dinasti Samaniyah bermula dari krisis otoritas pusat yang dipicu oleh suksesi kepemimpinan yang tidak stabil setelah masa pemerintahan Amir Nasr II. Ketika kendali

⁸ Philip K. Hitti, *Sejarah Ringkas Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 392–394.

pemerintahan jatuh ke tangan penguasa yang masih muda atau kurang berpengalaman, struktur birokrasi yang sebelumnya sangat efisien mulai mengalami keretakan dan faksionalisme. Para menteri dan pejabat tinggi istana mulai saling berebut pengaruh, sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada stabilitas negara. Lemahnya pengawasan dari pusat menyebabkan gubernur-gubernur di provinsi yang jauh mulai bertindak secara otonom dan menolak mengirimkan upeti atau pajak ke Bukhara. Ketidakmampuan amir dalam menjaga disiplin administratif ini mengakibatkan terkurasnya kas negara, yang pada gilirannya melemahkan kemampuan dinasti untuk membiayai proyek infrastruktur dan pertahanan. Ketegangan internal ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh berbagai faksi untuk memanipulasi kebijakan kerajaan demi keuntungan jangka pendek. Akibatnya, wibawa keluarga Samaniyah di mata rakyat dan sekutu-sekutunya merosot tajam, mengubah citra mereka dari pelindung peradaban menjadi dinasti yang terjebak dalam intrik istana yang tak berkesudahan.

Salah satu faktor paling krusial dalam jatuhnya Samaniyah adalah ketergantungan yang berlebihan pada tentara budak asal Turk (Mamluk). Awalnya, prajurit Turk ini direkrut sebagai pengawal pribadi amir yang setia dan profesional untuk mengimbangi kekuatan aristokrasi lokal Persia. Namun, seiring berjalannya waktu, para komandan Turk ini tumbuh menjadi faksi militer yang sangat kuat dan mulai mendominasi urusan politik di istana Bukhara. Mereka tidak lagi sekadar menjadi alat kekuasaan amir, melainkan menjadi "pembuat raja" yang bisa mengangkat atau menjatuhkan penguasa sesuka hati. Tokoh-tokoh seperti Alptigin dan Sebuktigin, yang awalnya adalah perwira setia, akhirnya memisahkan diri dan membangun basis kekuatan mandiri yang kelak menjadi cikal bakal Dinasti Ghaznawiyah. Militerisasi politik ini menyebabkan amir Samaniyah kehilangan kendali atas angkatan bersenjata sendiri. Ketika militer tidak lagi setia kepada ideologi negara melainkan kepada panglima perang masing-masing, pertahanan wilayah perbatasan menjadi terabaikan, dan kohesi nasional hancur di bawah beban ambisi militer yang tidak terkendali.⁹

Masalah ekonomi juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempercepat keruntuhan dinasti ini. Samaniyah sangat bergantung pada pendapatan dari jalur perdagangan Jalur Sutra yang melewati Transoxiana. Namun, pada paruh kedua abad ke-10, terjadi gangguan besar

⁹ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* Jilid II (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1997), hlm. 150–152.

pada rute perdagangan utara menuju Eropa Timur dan wilayah Volga, yang selama ini menjadi sumber emas dan perak bagi dinasti tersebut. Penurunan volume perdagangan ini menyebabkan krisis moneter yang parah, yang ditandai dengan penurunan kualitas koin perak (dirham) Samaniyah. Inflasi yang diakibatkannya memukul sektor ekonomi perkotaan dan menyebabkan keresahan sosial di pusat-pusat peradaban seperti Bukhara dan Samarkand. Selain itu, beban pajak yang berat yang dibebankan kepada para petani untuk menutupi biaya militer yang membengkak memicu berbagai pemberontakan di pedesaan. Ketidakstabilan ekonomi ini tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat tetapi juga menghambat kemampuan dinasti untuk mendanai riset keilmuan dan seni yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, sehingga daya tarik intelektual Samaniyah mulai memudar seiring dengan menipisnya pundi-pundi negara.

Faktor eksternal yang menjadi pukulan terakhir bagi Samaniyah adalah munculnya kekuatan baru dari suku-suku Turk di Asia Tengah, khususnya Dinasti Qarakhaniah. Berbeda dengan prajurit Turk yang telah terintegrasi dalam sistem Samaniyah, Qarakhaniah adalah konfederasi suku nomaden yang baru memeluk Islam dan memiliki kekuatan militer yang sangat masif. Mereka melihat kelemahan Samaniyah sebagai peluang emas untuk menguasai wilayah Transoxiana yang subur. Pada saat yang sama, wilayah selatan Samaniyah terus digerogeti oleh ambisi Dinasti Ghaznawiyah yang semakin ekspansif. Samaniyah terjepit di antara dua kekuatan besar Turk: Qarakhaniah dari utara dan Ghaznawiyah dari selatan. Meskipun amir Samaniyah mencoba melakukan diplomasi dan meminta bantuan kepada para panglima perangnya, dukungan tersebut sangat minim karena para panglima tersebut sudah lebih sibuk mengamankan wilayah mereka sendiri. Serangan bertubi-tubi dari Qarakhaniah akhirnya memuncak pada jatuhnya ibu kota Bukhara pada tahun 999 M, yang secara simbolis dan praktis mengakhiri kedaulatan dinasti Persia terakhir yang pernah mendominasi wilayah tersebut sebelum gelombang supremasi Turk mengambil alih sepenuhnya.¹⁰

Secara sosiologis, kemunduran Samaniyah juga dipengaruhi oleh disintegrasi dukungan dari kelas aristokrasi tanah (Dehqan) yang selama ini menjadi pilar sosial utama dinasti. Para Dehqan merasa bahwa kepentingan mereka tidak lagi dilindungi oleh amir yang terjebak dalam pengaruh militer Turk dan birokrat yang korup. Kehilangan dukungan dari kelas pemilik tanah ini berarti

¹⁰ Hugh Kennedy, *Nabi Muhammad dan Masa Kekhalifahan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 268–270.

Samaniyah kehilangan akses langsung ke sumber daya manusia dan logistik di tingkat lokal. Selain itu, perpecahan sektarian dan perbedaan pendapat di kalangan ulama juga mulai muncul, melemahkan konsensus sosial yang sebelumnya sangat solid. Ketika struktur sosial yang menyangga negara runtuh, legitimasi moral penguasa pun ikut hilang. Jatuhnya Samaniyah bukan hanya merupakan kekalahan militer, tetapi merupakan kegagalan sistemik dalam mengelola transisi kekuasaan dari model tradisional Persia ke realitas politik baru yang didominasi oleh unsur-unsur Turk. Warisan Samaniyah memang tetap hidup dalam bentuk bahasa dan budaya, namun secara politik, ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan demografi militer dan ekonomi di Asia Tengah memastikan bahwa masa kejayaan mereka harus berakhir di tangan kekuatan-kekuatan baru yang mereka bantu ciptakan sendiri.

Pertempuran di wilayah Transoxiana pada akhir abad ke-10 tidak lagi mencerminkan kejayaan militer Samaniyah yang dahulu ditakuti, melainkan menjadi panggung bagi pengkhianatan dan kelemahan koordinasi. Salah satu titik balik yang paling krusial terjadi pada tahun 992 M, ketika penguasa Qarakhaniah, Harun Bughra Khan, meluncurkan invasi besar-besaran ke jantung wilayah Samaniyah. Pertahanan Samaniyah yang dipimpin oleh Amir Nuh II terbukti sangat rapuh karena banyaknya panglima perang yang melakukan pembangkangan. Di tengah tekanan militer ini, terjadi pengkhianatan besar oleh Abu Ali al-Simjuri dan Fa'iq Khassa, dua jenderal tinggi Samaniyah yang justru menjalin kesepakatan rahasia dengan pihak musuh.

C. Dinasti Ghaznawiyah

Proses transisi budaya dari Samaniyah ke Ghaznawiyah merupakan salah satu fenomena paling unik dalam sejarah Islam, di mana bangsa penakluk justru mengadopsi identitas budaya dari pihak yang mereka taklukkan. Berdasarkan perspektif sejarah sosiokultural, Sultan Mahmud al-Ghaznawi menyadari bahwa untuk melegitimasi kekuasaannya di wilayah yang sangat kental dengan tradisi Persia, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer Turk semata. Oleh karena itu, ia secara sadar memindahkan pusat gravitasi intelektual dari Bukhara ke Ghazna. Ghaznawiyah mengambil alih model birokrasi Samaniyah secara utuh, termasuk penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi administrasi dan korespondensi diplomatik. Hal ini dilakukan karena para birokrat Samaniyah yang terampil, yang dikenal sebagai kelas *dabir*, direkrut secara massal untuk mengisi posisi penting dalam pemerintahan Ghaznawiyah. Dengan mempertahankan

sistem administrasi ini, Ghaznawiyah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan politik di wilayah Khorasan yang luas. Integrasi ini memastikan bahwa meskipun penguasanya berganti dari etnis Persia ke etnis Turk, nafas pemerintahan dan tata kelola negara tetap berjalan dalam rel yang telah dibangun oleh Samaniyah selama berabad-abad, menciptakan sebuah sintesis budaya yang kemudian dikenal sebagai tradisi Turko-Persia.¹¹

Dalam bidang literatur dan bahasa, Ghaznawiyah bertindak sebagai pelindung utama yang memastikan keberlangsungan bahasa Persia Baru (*New Persian*) yang sebelumnya telah disemai oleh Samaniyah. Mengacu pada sumber-sumber sastra klasik, istana Ghazna di bawah Sultan Mahmud bertransformasi menjadi magnet bagi para penyair dan ilmuwan paling cemerlang di masanya. Salah satu pencapaian terbesar dari pengambilan alih warisan ini adalah penyelesaian karya epik *Shahnameh* oleh Ferdowsi. Meskipun proyek ini dimulai pada masa Samaniyah, Sultan Mahmudlah yang akhirnya menyediakan platform (meskipun dengan hubungan yang kompleks) bagi penyelesaian mahakarya yang mendefinisikan identitas bangsa Persia tersebut. Selain itu, sejarawan mencatat bahwa Ghaznawiyah tidak hanya melestarikan puisi, tetapi juga memformalkan tradisi sejarah atau historiografi Islam-Persia.¹² Dengan mendukung penulisan sejarah dalam bahasa Persia, Ghaznawiyah membantu mengamankan posisi bahasa tersebut sebagai bahasa intelektual kedua di dunia Islam setelah bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa Ghaznawiyah bukan sekadar penghancur dinasti, melainkan ahli waris yang memperluas jangkauan budaya Persia hingga ke anak benua India melalui kampanye militer mereka yang luas.

Dari sudut pandang arsitektur dan seni rupa, Dinasti Ghaznawiyah mengadopsi dan mengembangkan gaya visual Samaniyah yang elegan, kemudian menambahkannya dengan elemen kemegahan militer. Studi arkeologi pada sisa-sisa reruntuhan di Ghazna dan Lashkari Bazar menunjukkan pengaruh kuat dari teknik konstruksi bata Samaniyah yang rumit, yang dikombinasikan dengan dekorasi epigrafik Arab dan motif hias Persia. Sultan Mahmud dan para penerusnya membangun masjid, madrasah, dan istana yang meniru kemegahan Bukhara dan Samarkand, namun dengan skala yang lebih besar untuk menunjukkan kekuatan imperium baru mereka. Penggunaan menara yang menjulang tinggi dan teknik dekorasi dinding yang menggunakan ukiran plester (*stucco*) menjadi ciri khas yang diwarisi dari tradisi Samaniyah.

¹¹ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* Jilid II (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1997), hlm. 156–159.

¹² Hugh Kennedy, *Nabi Muhammad dan Masa Kekhalifahan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 271–273.

Selain itu, seni kerajinan logam dan keramik yang berkembang di bawah Ghaznawiyah menunjukkan kelanjutan teknis dari pengrajin Khorasan yang sebelumnya bekerja untuk amir-amir Samaniyah. Warisan visual ini sangat penting karena melalui ekspansi Ghaznawiyah ke India, gaya arsitektur Turko-Persia ini diperkenalkan untuk pertama kalinya ke Asia Selatan, yang nantinya akan menjadi cikal bakal bagi perkembangan arsitektur Islam India yang sangat monumental di masa-masa berikutnya.

Secara intelektual dan religius, Ghaznawiyah meneruskan peran Samaniyah sebagai benteng pertahanan Islam Sunni di wilayah timur, namun dengan pendekatan yang lebih ortodoks. Berdasarkan tinjauan sejarah keagamaan, Samaniyah telah meletakkan fondasi bagi berkembangnya teologi Maturidiyah dan hukum Hanafi di Transoxiana. Ghaznawiyah mengambil alih peran sebagai pelindung ulama Sunni ini dan menggunakannya sebagai alat legitimasi untuk melawan pengaruh Dinasti Buyid yang berpaham Syiah di wilayah barat serta ancaman Ismailiyah di Multan. Sultan Mahmud sangat aktif mengundang para ilmuwan besar seperti Al-Biruni ke istananya. Al-Biruni, yang awalnya bekerja di bawah naungan berbagai penguasa di wilayah Khwarizm dan dipengaruhi oleh iklim intelektual Samaniyah, dibawa ke Ghazna dan diberikan fasilitas untuk melakukan risetnya yang fenomenal, termasuk studinya tentang India (*Tahqiq ma li al-Hind*). Dengan demikian, Ghaznawiyah memastikan bahwa tradisi keilmuan rasional dan sains yang telah berkembang pesat di masa Samaniyah tidak berhenti begitu saja setelah jatuhnya Bukhara, melainkan tetap berlanjut dan bahkan menyebar ke wilayah-wilayah baru di bawah payung perlindungan politik yang lebih kuat.

Sebagai penutup analisis sejarah ini, dapat disimpulkan bahwa Ghaznawiyah berfungsi sebagai jembatan yang sangat efektif dalam mentransmisikan peradaban Samaniyah ke masa depan yang lebih luas. Tanpa adopsi budaya yang dilakukan oleh Ghaznawiyah, warisan intelektual dan administratif Persia mungkin akan terkubur bersama runtuhnya kekuasaan politik Samaniyah di bawah serangan suku-suku nomaden Asia Tengah yang belum terpengaruh budaya kota. Ghaznawiyah menciptakan pola di mana bangsa Turk yang berkuasa secara militer menggunakan budaya Persia sebagai identitas peradaban mereka, sebuah pola yang nantinya akan diikuti oleh Dinasti Seljuk, Dinasti Khwarizmian, hingga Kesultanan Mughal di India. Samaniyah terakhir turun takhta.

D. Masa kemunduran Ghaznawiyah

Kemunduran Dinasti Ghaznawiyah secara garis besar bermula dari masalah suksesi dan beban kepemimpinan pasca wafatnya Sultan Mahmud al-Ghaznawi pada tahun 1030 M. Sultan Mahmud telah membangun kekaisaran yang sangat luas dan tersentralisasi, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kharisma pribadi dan kemampuan militer sang penguasa. Ketika takhta jatuh ke tangan putranya, Mas'ud I, terjadi ketidakstabilan internal akibat persaingan persaudaraan dan faksionalisme di kalangan elit militer. Mas'ud I, meskipun seorang pejuang yang berani, tidak memiliki kecerdasan strategis dan diplomasi seperti ayahnya. Ia sering mengabaikan nasihat dari para menteri senior yang berpengalaman dari era Samaniyah dan lebih memilih untuk mendengarkan lingkaran dalam yang kurang kompeten. Kegagalan dalam menjaga kesetiaan para panglima perang dan birokrat ini menyebabkan keretakan dalam struktur pemerintahan. Selain itu, ketergantungan pada penaklukan wilayah baru sebagai sumber pendapatan utama mulai menjadi bumerang ketika ekspansi militer melambat, sementara biaya pemeliharaan tentara bayaran yang besar tetap harus dibayar, yang akhirnya memicu krisis keuangan di pusat pemerintahan Ghazna.

Secara militer, kekalahan telak dalam Pertempuran Dandanaqan pada tahun 1040 M melawan bangsa Seljuk menjadi titik balik yang paling menghancurkan bagi Ghaznawiyah. Dalam pertempuran ini, pasukan Ghaznawiyah yang besar dan bersenjata lengkap secara mengejutkan dikalahkan oleh pasukan Seljuk yang lebih lincah dan menggunakan taktik gerilya padang pasir. Kekalahan ini bukan sekadar kekalahan di medan laga, melainkan sebuah bencana geopolitik yang mengakibatkan Ghaznawiyah kehilangan seluruh wilayah kekuasaan mereka di Khorasan dan Iran Timur. Wilayah-wilayah strategis yang merupakan jantung ekonomi dan budaya kekaisaran jatuh ke tangan Seljuk, memaksa penguasa Ghaznawiyah untuk mundur dan memusatkan kekuasaan mereka di wilayah yang lebih terbatas di Afghanistan Timur dan Punjab (India Utara). Kehilangan Khorasan berarti kehilangan akses terhadap sumber daya manusia, pusat-pusat intelektual, dan jalur perdagangan utama Jalur Sutra. Peristiwa Dandanaqan secara efektif mengubah status Ghaznawiyah dari sebuah kekaisaran trans-regional yang perkasa menjadi kekuatan regional yang defensif dan terjepit di pegunungan Afghanistan.

Faktor ekonomi dan sosial juga mempercepat keruntuhan dinasti ini, terutama terkait dengan sistem pemungutan pajak yang sangat menindas. Karena wilayah kekuasaan mereka semakin menyempit sementara gaya hidup mewah istana dan kebutuhan militer tidak berkurang, para sultan

Ghaznawiyah akhir mulai memeras rakyat dengan pajak yang sangat berat. Hal ini menyebabkan keresahan sosial yang meluas dan pemberontakan di berbagai provinsi. Di wilayah India, meskipun mereka berhasil mempertahankan kendali di Lahore, mereka terus menghadapi perlawanan gigih dari penguasa lokal Hindu (Rajput) yang mulai mengonsolidasikan kekuatan untuk merebut kembali tanah mereka. Ketidakmampuan Ghaznawiyah untuk mengintegrasikan penduduk lokal secara harmonis—berbeda dengan cara Samaniyah mengelola Persia membuat kedudukan mereka di India selalu berada dalam kondisi siaga perang yang mahal. Inflasi dan ketidakstabilan ekonomi di ibu kota Ghazna juga menghambat perkembangan seni dan sains, yang sebelumnya menjadi kebanggaan dinasti tersebut, sehingga daya tarik kultural Ghaznawiyah perlahan meredup seiring dengan melemahnya kekuatan politik mereka.

Munculnya kekuatan saingan baru dari wilayah pegunungan Ghor, yaitu Dinasti Ghori, menjadi ancaman eksistensial terakhir bagi Ghaznawiyah. Para penguasa Ghor, yang awalnya adalah bawahan atau vasal dari Ghaznawiyah, mulai bangkit dan memanfaatkan kelemahan internal tuan mereka. Persaingan ini mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-12 ketika Alauddin Husain dari Ghor melancarkan serangan balasan yang sangat destruktif terhadap kota Ghazna. Dalam peristiwa yang dikenal sejarah sebagai penghancuran total, Alauddin membakar kota Ghazna selama tujuh hari tujuh malam, yang membuatnya dijuluki sebagai *Jahan-suz* atau "Pembakar Dunia." Penjarahan ini menghancurkan perpustakaan, istana, dan monumen megah yang dibangun oleh Sultan Mahmud, menyisakan hanya puing-puing dan beberapa menara. Kehancuran Ghazna sebagai pusat politik dan budaya memaksa keluarga kerajaan Ghaznawiyah untuk melarikan diri ke Lahore, yang kemudian menjadi ibu kota terakhir mereka sebelum benar-benar lenyap dari panggung sejarah.

Jatuhnya Lahore menandai berakhirnya kekuasaan politik dinasti yang telah memerintah selama lebih dari dua ratus tahun. Keruntuhan ini memberikan pelajaran penting dalam sejarah Islam mengenai bahayanya sebuah negara yang terlalu bergantung pada kekuatan militer tanpa didukung oleh kohesi sosial dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Ghaznawiyah runtuh, mereka meninggalkan warisan berupa penyebaran awal Islam di anak benua India yang sangat mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Persia menempati posisi strategis dalam sejarah Islam sebagai pusat peradaban yang tidak hanya berkontribusi dalam bidang keilmuan, budaya, dan administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang penting bagi pembentukan identitas politik dan keagamaan. Melalui Dinasti Syafawiyah, Persia mengalami konsolidasi kekuasaan yang kuat dengan menjadikan mazhab Syiah Dua Belas sebagai ideologi negara, yang berdampak besar terhadap struktur sosial, politik, dan religius hingga membentuk karakter keislaman Persia yang khas. Dinasti ini juga berhasil memperkuat institusi negara serta mendorong perkembangan seni, arsitektur, dan tradisi intelektual Islam.

Sementara itu, Dinasti Qajar merepresentasikan fase transisi dan tantangan dalam sejarah Persia, ditandai oleh melemahnya otoritas politik, tekanan kolonial Barat, serta upaya modernisasi yang belum sepenuhnya berhasil. Dinamika kekuasaan pada masa Qajar menunjukkan kompleksitas hubungan antara tradisi Islam, kepentingan politik, dan pengaruh global. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa pengalaman historis Persia di bawah Dinasti Syafawiyah dan Qajar memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan peradaban Islam serta dinamika kekuasaan yang membentuk dunia Islam hingga masa modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Syalabi Ahmad, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.
- Yatim Badri ,Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000.
- Ahmad al-Usairy, at-Tarikhul Islami, Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Bano, W. (2018). *The Islamic World: A History in Documents*. Oxford: Oxford University Press.
- Silverstein, A. J. (2020). *Islamic History: A Very Short Introduction* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Bennison, A. K. (2019). *The Articulation of Power in Medieval Islam*. London: Routledge.
- Starr, S. F. (2018). *Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane*. Princeton: Princeton University Press.
- Lapidus, I. M. (2018). *A History of Islamic Societies* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kenndey Hugh, *Nabi Muhammad dan Masa Kekhalifahan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 262.

Fakhry Ajid,, *Sejarah Filsafat Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), hlm. 123–125.